

# Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsivitas dalam Pengelolaan APBDes terhadap Kepercayaan Publik

Dhea Nur Azizah <sup>1</sup>, Emy Kholifah R <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Jember; [dheaazizah2017@gmail.com](mailto:dheaazizah2017@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Jember; [emykholifah@unmuhjember.ac.id](mailto:emykholifah@unmuhjember.ac.id)

**Abstrak:** Kepercayaan masyarakat di Indonesia terhadap pemerintah saat ini telah mengalami kemunduran. Terdapat kasus penyelewengan dana APBDes oleh salah satu kepala desa di Banyuwangi pada tahun 2022, hal tersebut terjadi karena kepala desa tidak menerapkan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas yang menjadi syarat terciptanya good governance. Oleh karena itu terdapat tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pengelolaan APBDes secara individu dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan deskriptif. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh pemuda yang berjumlah 40 orang. Untuk menentukan hasil dalam penelitian ini di uji menggunakan uji t dan uji F. Hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel trasparansi tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kepercayaan publik. Variabel akuntabilitas juga tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kepercayaan publik. Berbeda dengan variabel transparansi dan akuntabilitas, variabel responsivitas memiliki pengaruh terhadap variabel kepercayaan publik. Secara bersama-sama variabel transparansi, akuntabilitas dan responsivitas berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kepercayaan publik.

**Keywords:** transparansi, akuntabilitas, responsivitas, APBDes, kepercayaan.

DOI: <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.117>

\*Correspondensi: Dhea Nur Azizah dan Emy Kholifah R

Email: [dheaazizah2017@gmail.com](mailto:dheaazizah2017@gmail.com),  
[emykholifah@unmuhjember.ac.id](mailto:emykholifah@unmuhjember.ac.id)

Received: 09-08-2023

Accepted: 13-09-2023

Published: 27-10-2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Indonesian people's trust in the government has currently declined. There was a case of misappropriation of APBDes funds by one of the village heads in Banyuwangi in 2022, this happened because the village head did not apply the principles of transparency and accountability principles which are conditions for creating good governance. Therefore, the aim of this research is to find out whether transparency, accountability and responsiveness in the management of the APBDes individually and collectively have an effect on public trust. The method used in this research is quantitative methods through a descriptive approach. The population and sample used in this research were community leaders, religious leaders, educational leaders and youth leaders totaling 40 people. To determine the results in this study, they were tested using the t test and F test. The results obtained in this study indicate that the transparency variable has no influence on the public trust variable. The accountability variable also has no influence on the public trust variable. In contrast to the transparency and accountability variables, the responsiveness variable has an influence on the public trust variable. Taken together, the variables transparency, accountability and responsiveness have no significant effect on the variable public trust.

**Keywords:** transparency, accountability, responsiveness, APBDes, trust.

## Pendahuluan

Masyarakat di Indonesia memiliki kecenderungan untuk kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan pengawas negara, bahkan ada yang menyatakan belum membutuhkan otoritas publik. Kecenderungan asumsi individu terhadap pelaksanaan pemerintahan yang berbeda dengan kinerja pemerintah sebenarnya merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sukmawati, 2019). Pembuatan laporan keuangan dan kinerja pemerintah adalah suatu dari beberapa cara yang penting untuk memberikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat agar dapat terpuaskan (Daniprawiro, 2013). Transparansi, akuntabilitas dan responsivitas merupakan prinsip *good governance* yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Agar masyarakat sejahtera, pemerintah di negara ini membutuhkan dasar yang kuat untuk mengelola APBDes dengan baik. Akan tetapi dalam pengelolaan APBDes tersebut banyak pemerintah desa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan dana APBDes untuk kepentingan secara pribadi yang dapat mengakibatkan kelenyapan dana yang berdampak pada masyarakat desa (Kepramareni, 2020; Mujtahid, 2019). Karena pemerintah kurang transparan dalam pengelolaan keuangan APBDes, banyak masyarakat desa yang kurang percaya kepada pemerintah.

Kasus penyelewengan dana APBDes oleh salah satu kepala desa ditemukan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena kurang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Fanani, 2021). Berdasarkan media online, Desa Wringinpitu merupakan satu dari sembilan desa yang ada di Daerah Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi dimana dalam penyelenggaraan pemerintahannya di duga ada penyelewengan uang desa yang dilakukan oleh Kepala Desa (Sugiharti, 2021). Di Desa Wringinpitu terdapat kegiatan yang belum berjalan secara optimal yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Wringinpitu juga tercipta ketidakpercayaan masyarakat. Misalnya jalan-jalan desa banyak yang rusak tetapi selama ini belum ada perbaikan dari pihak pemerintah desa, hal ini terasa kurang meyakinkan dari daerah setempat terkait penyelenggaraan APBDes (Sonbay, 2022). Kasus tersebut yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pengelolaan APBDes terhadap kepercayaan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sofyani & Tahar, 2021) menurut penelitian tersebut yang memiliki judul "Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa" memberikan hasil yaitu transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat sedangkan akuntabilitas tidak. Berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh (Apriliana, 2019) yang diberi judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat, mendapatkan hasil bahwa transparansi tidak mempengaruhi kepercayaan publik sedangkan akuntabilitas mempengaruhi kepercayaan publik (Nugroho, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh sofyani dan apriliana hanya berfokus pada transparansi, akuntabilitas dan belum ada yang berfokus pada responsivitas. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan responsivitas dalam pengelolaan APBDes terhadap kepercayaan publik (Ash-Shidiqqi, 2018).

## Metode

### Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif ini menggunakan data yang berupa angka sebagai alat supaya dapat menganalisis keterangan tentang apa yang akan dicari (Sugiono, 2018).

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wringinpitu, Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Peneliti melakukan penelitian di Desa Wringinpitu karena adanya dugaan kasus penyelewengan dana APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kusumo, 2022). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2023.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Desa Wringinpitu, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi terdiri atas 3 dusun yakni Dusun Ringinasri, Dusun Bayatrejo, dan Dusun Ringinanom dengan jumlah penduduk sebesar 9296 jiwa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh pemuda yang tinggal di Desa Wringinpitu dengan jumlah sampel sebesar 40 orang responden (Umar, 2018). Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih karena masyarakat yang dijadikan sampel sudah mampu menjawab pernyataan dengan tepat dan benar (Saputra, 2019).

### Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini meliputi: pertama, observasi terlebih dahulu dilokasi untuk mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi. Kedua, pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden pada populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Ketiga, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan maupun pernyataan tertulis kepada responden agar bisa dijawabnya (Savitri, 2019). Dalam pengukuran jawaban dari penyebaran kuesioner untuk mengukur tingkat transparansi, akuntabilitas dan responsivitas yang telah dijawab oleh responden, peneliti menggunakan skala Likert yang mana dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert umumnya menggunakan 5 angka penelitian, yaitu: Sangat Setuju (SS) dengan score 5, Setuju (S) dengan skor 4, Ragu-Ragu (RR) dengan skor 3, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1.

### Sumber Data

Sumber data yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa daftar pertanyaan atau kuesioner dan data sekunder berupa data APBDes, data jumlah penduduk, struktur organisasi dan selayang pandang Desa (Widhiastuti, 2020). Selain itu data

sekunder lainnya diperoleh dari jurnal, literatur atau data yang berhubungan dengan penelitian ini.

### Pengujian Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menggunakan uji t dan uji f dimana dalam menentukan dalam pengambilan keputusan penelitian ini menggunakan kriteria pengujian apabila tingkat t hitung  $>$  t tabel dan tingkat signifikansi  $<$  (0,05), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menjelaskan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila t hitung  $<$  t tabel dan tingkat signifikansi  $>$  (0,05), maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

### Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsivitas dalam Pengelolaan APBDes Terhadap Kepercayaan Publik. Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, dimana Transparansi, Akuntabilitas dan Responsivitas merupakan bagian dari 14 prinsip *Good Governance* (Purba, 2022). Untuk mengetahui tingkat transparansi pemerintah desa, peneliti menggunakan teori dari (Kristianten, 2006) yang meliputi 4 indikator yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Untuk mengukur tingkat akuntabilitas pemerintah desa, peneliti menggunakan teori dari Elwood (1999) dalam (Mardiasmo, 2009) yang meliputi pertanggungjawaban hukum, manjerial, program, kebijakan, dan finansial. Sedangkan untuk mengukur tingkat responsivitas pemerintah desa, peneliti menggunakan teori dari menurut Len Vine (1990) dalam (Dwiyanto, 2008) yang meliputi 3 indikator yaitu kapabilitas, loyalitas profesional dan sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik. Berikut ini merupakan hasil kuesioner dalam pemerintian ini:

Transparansi ( $X_1$ )

Gambar 1. Hasil kuesioner variabel transparansi



Berdasarkan gambar grafik 1 dan sesuai dengan teori transparansi dari Kristianten yang digunakan dalam penelitian ini, grafik tersebut dapat dibaca bahwa mereka yang memberikan tanggapan atas pertanyaan nomor 1-10 variabel transparansi mendapatkan

hasil yaitu tanggapan sangat setuju dengan jumlah 110, tanggapan setuju dengan jumlah 187, tanggapan ragu-ragu dengan jumlah 97 dan tanggapan tidak setuju dengan jumlah 6.

### Akuntabilitas (X<sub>2</sub>)

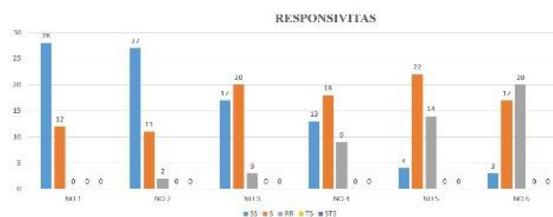
Gambar 2. Hasil kuesioner variabel akuntabilitas



Berdasarkan gambar grafik 2 dan sesuai dengan teori akuntabilitas dari Elwood yang digunakan dalam penelitian ini, grafik tersebut dapat dibaca bahwa mereka yang memberikan tanggapan atas pertanyaan nomor 1-10 variabel akuntabilitas mendapatkan hasil yaitu tanggapan sangat setuju dengan jumlah 177, tanggapan setuju dengan jumlah 160, tanggapan ragu-ragu dengan jumlah 58 dan tanggapan tidak setuju dengan jumlah 5 (Masrizal, 2019).

### Responsivitas (X<sub>3</sub>)

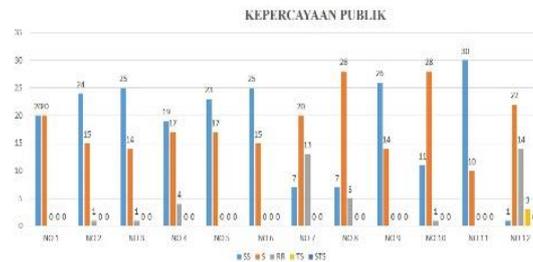
Gambar 3. Hasil kuesioner variabel responsivitas



Berdasarkan gambar grafik 3 dan sesuai dengan teori responsivitas dari Len Vine yang digunakan dalam penelitian ini, grafik tersebut dapat dibaca bahwa mereka yang memberikan tanggapan atas pertanyaan nomor 1-10 variabel transparansi mendapatkan hasil yaitu tanggapan sangat setuju dengan jumlah 92, tanggapan setuju dengan jumlah 100 dan tanggapan ragu-ragu dengan jumlah 48 (Purwadinata, 2019).

### Kepercayaan Publik (Y)

Gambar 4. Hasil kuesioner variabel kepercayaan publik



Berdasarkan gambar grafik 4 dan sesuai dengan teori kepercayaan dari Doney dan Cannon yang digunakan dalam penelitian ini, grafik tersebut dapat dibaca bahwa mereka yang memberikan tanggapan atas pertanyaan nomor 1-10 variabel transparansi mendapatkan hasil yaitu tanggapan sangat setuju dengan jumlah 218, tanggapan setuju dengan jumlah 220, tanggapan ragu-ragu dengan jumlah 39 dan tanggapan tidak setuju dengan jumlah 3.

Tabel 1. Hasil Uji T

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	40,857	8,479		4,818	,000
	Transparansi	,045	,188	,044	,239	,812
	Akuntabilitas	-,070	,200	-,061	-,353	,726
	Responsivitas	,514	,233	,385	2,209	,034

Sumber: Uji T Pada SPSS

Berdasarkan tabel 1 maka t tabel diperoleh angka sebesar 1,688 dengan rumus  $dk = n - k$ , yang mana (n) merupakan jumlah sampel dan (k) merupakan jumlah variabel. Berdasarkan tabel di atas, hasil berikut merupakan hasil yang diperoleh, yaitu:

- a. Pengaruh Transparansi ( $X_1$ ) terhadap Kepercayaan Publik (Y)
- b. Variabel transparansi memiliki tingkat signifikansi 0,812 lebih besar dari 0,05 dan t hitung 0,239 lebih kecil dari t tabel 1,688. Menurut temuan ini, variabel kepercayaan publik tidak terpengaruh dengan cara apapun, bentuk, atau bentuk apapun oleh variabel transparansi. Oleh karena itu, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- a. Pengaruh Akuntabilitas ( $X_2$ ) terhadap Kepercayaan Publik (Y)
- c. Variabel Akuntabilitas memiliki t hitung 0,353 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,688 dan nilai signifikansi sebesar 0,726  $>$  0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial dan secara signifikan variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap variabel kepercayaan publik. Oleh karena itu, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- a. Pengaruh Responsivitas ( $X_3$ ) terhadap Kepercayaan Publik (Y)

- d. Variabel Responsivitas memiliki  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $2,209 > 1,688$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,034 < 0,05$  yang berarti bahwa secara parsial dan secara signifikan variabel transparansi berpengaruh terhadap variabel kepercayaan publik. Oleh karena itu, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>				
Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
69,801	3	23,267	2,158	,110 <sup>b</sup>
388,174	36	10,783		
457,975	39			

a. Dependent Variable: Kepercayaan Publik

Sumber : Uji F Pada SPSS

Diketahui  $F$  tabel yaitu sebesar 2,87. Berdasarkan tabel 2 maka diperoleh nilai  $F$  hitung sebesar 2,158 lebih kecil daripada  $F$  tabel yaitu sebesar 2,87 dengan tingkat signifikansinya yaitu  $0,110 > 0,05$ . Karena  $F$  hitung lebih kecil dari  $F$  tabel berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Transparansi ( $X_1$ ), Akuntabilitas ( $X_2$ ), dan Responsivitas ( $X_3$ ) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Kepercayaan Publik ( $Y$ ). Diketahui bahwa hasil penelitian ini menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan publik. Hal ini berbeda dengan hasil temuan peneliti lain bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan (Diansari, 2023). Selain itu perbedaan hasil yang mendasar penelitian ini dengan penelitian lain yaitu penambahan variabel responsivitas, dimana hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa responsivitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan publik (Magdalena, 2020).

## Simpulan

Hasil dari uji  $t$  menunjukkan bahwa Variabel Transparansi memiliki  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel yaitu  $0,239 < 1,688$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,812 > 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan cara parsial dan secara signifikan variabel transparansi tidak mempengaruhi terhadap variabel kepercayaan publik. Variabel Akuntabilitas memiliki  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel yaitu  $0,353 < 1,688$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,726 > 0,05$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan cara parsial dan secara signifikan variabel transparansi tidak mempengaruhi terhadap variabel kepercayaan publik. Dan Variabel Responsivitas memiliki  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $2,209 > 1,688$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,034 < 0,05$  yang berarti bahwa dengan cara parsial dan secara signifikan variabel transparansi mempengaruhi terhadap variabel kepercayaan publik. Hasil dari uji  $F$  menunjukkan bahwa nilai  $F$  hitung sebesar 2,158 lebih kecil daripada  $F$  tabel yaitu sebesar 2,87 dengan tingkat signifikansinya yaitu  $0,110 > 0,05$ . Karena  $F$  hitung  $<$   $F$  tabel berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsivitas memiliki pengaruh

tidak signifikan dalam pengelolaan APBDes terhadap Kepercayaan Publik di Desa Wringinpitu Kecamatan Tegaldimo Kabupaten Banyuwangi. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel selain transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas agar hasil dari penelitian selanjutnya menjadi lebih baik lagi.

## Daftar Pustaka

- Apriliana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Akurasi*, 109–122.
- Ash-Shidiqqi, E. A. (2018). Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 195–212. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27524>
- Daniprawiro, M. (2013). *Opini*. <https://madina.co.id/indeks.php/opini/4973-hilangnya-kepercayaan-terhadap-para-pemimpin>
- Diansari, R. E. (2023). PERCEPTION OF PROSOCIAL BEHAVIOR IN ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN INDONESIA: THE MODERATING ROLE OF INTERNAL CONTROL AND LEADERSHIP. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1481>
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Fanani, A. (2021). *Diduga Korupsi Rp 1.4 Miliar, Kades di Banyuwangi Ditahan*. Banyuwangi, Kepramareni, P. (2020). Village accountability of village fund management in Gianyar Bali Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(1), 849–855. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12SP1/20201136>
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Kusumo, W. K. (2022). Effectiveness of Internal Control System as Early Detection Tool in Fraud Prevention of Village Fund Management. *Review of Economics and Finance*, 20, 119–123. <https://doi.org/10.55365/1923.X2022.20.12>
- Magdalena, H. (2020). Web-Based Village Fund Management Monitoring System. *2020 8th International Conference on Cyber and IT Service Management, CITSM 2020*. <https://doi.org/10.1109/CITSM50537.2020.9268923>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Masrizal. (2019). The bargaining position of women in village fund management in Balee inong. *Opcion*, 35(89), 514–532.
- Mujtahid, I. (2019). Reinforcement the capacity of village fund management to improve the economy of local communities (Indonesia example). *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(10), 3659–3668.
- Nugroho, A. (2021). Village fund asymmetric information in disaster management: Evidence from village level in Banda Aceh City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 630(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/630/1/012011>

- Purba, R. B. (2022). Detection of Corruption in Village Fund Management using Fraud Analysis. *Quality - Access to Success*, 23(190), 120–128. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.190.14>
- Purwadinata, S. (2019). Uncovering principal-agent behavior in the village fund management technique. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(8), 1393–1401.
- Saputra, K. A. K. (2019). The role of human resource accounting and the synergy of village government in village fund management. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(11), 303–309. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V11I11/20193200>
- Savitri, E. (2019). The effectiveness of village fund management. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 1373–1377.
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Akademi Akuntansi*, 10–25.
- Sonbay, Y. Y. (2022). Cultural challenges in implementing village funds management system in achieving good village governance. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 10(1), 90–102. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2022.124118>
- Sugiharti, D. K. (2021). The Supervision of Village Fund Management to Prevent Corruption. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 356–378. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a3>
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmawati, F. (2019). The effect ability of village fund management apparatus, village government organizational commitments, and community participation on accountability for management of village funds in sub-districts in indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(7), 653–659.
- Umar, H. (2018). The influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7), 1526–1531.
- Widhiastuti, R. (2020). Determinants of fraud tendency in the management of village funds. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 11(4), 1482–1489. [https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4\(50\).44](https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4(50).44)